



**LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)  
TA. 2024**

**PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
Jl. COM. YOS SUDARSO NO. 42 Telp/Fax.0631-21544  
SIBOLGA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga Tahun 2024 telah kami susun. Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik serta mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Tujuan penyampaian laporan kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kota Sibolga Tahun 2024 sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran serta perencanaan strategik yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja BPBD Kota Sibolga ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan dan merupakan perwujudan Kinerja BPBD Kota Sibolga Tahun 2025.

LAKIP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2024

Kata Pengantar

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik

Demikian laporan ini disampaikan semoga bermanfaat khususnya bagi BPBD Kota Sibolga dalam upaya Good Governace di bidang kebencanaan dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sibolga, Februari 2025

Pt. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SIBOLGA  
SEKRETARIS,



ADE MAHLIGAI PUTRA LUBIS, ST., M.M.  
PEMBINA  
NIP. 19810505 200502 1 003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja setiap instansi pemerintah adalah kewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis yang dilaksanakan secara periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan *output* kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin karena disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setiap setahun sekali.

Pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pengukuran kinerja, dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Mekanisme penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 berisi Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Penutup, dan lampiran-lampiran yang mendukung, antara lain Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 disusun sebagai pelaporan kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Uraian tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman pada Rencana

Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 - 2026 serta Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024. Untuk mengukur pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dilakukan pengukuran melalui instrumen indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program, hasil kegiatan dan hasil sub kegiatan. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Pengukuran indikator kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Dari pelaksanaan 5 (Lima) sasaran dan 21 (Dua Puluh Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 4 (Empat) Kegiatan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024, capaian kinerja pada sasaran strategis **1. *Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel*** telah terlaksana 100% untuk 3 indikator, 1 indikator belum mencapai target dan 1 indikator lagi masih belum terlaksana penilaiannya. **2. *Menurunnya Risiko Bencana*** telah dilaksanakan 5 indikator kinerja dari 8 indikator dengan rincian 2 indikator mencapai 100%, 3 indikator tidak terpenuhi, sedangkan 3 indikator tidak terlaksana dikarenakan tidak ada anggaran. Untuk pencapaian sasaran strategis **3 *Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana***, dari 4 indikator telah mencapai 50% yaitu 2 indikator telah dilaksanakan 100% dan 2 indikator tidak terlaksana dikarenakan di Kota Sibolga tidak ada KLB dan penetapan status darurat. Pada sasaran strategis **4 *Terpulihkannya Sarana dan Prasarana Terdampak Bencana***, kedua indikator kinerja tidak dilaksanakan di tahun 2024 dikarenakan tidak adanya bencana yang ditetapkan sebagai darurat bencana dan tidak dilakukan kajian kebutuhan kerugian pasca bencana (JITUPASNA). Sedangkan untuk sasaran strategis **4 *Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*** yang hanya 1 indikator kinerja yaitu peningkatan nilai IKD tercapai dengan baik karena nilai IKD kota Sibolga menguat dari 0,23 ke 0,33.

Analisis atas capaian kinerja tersebut akan dimanfaatkan untuk :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

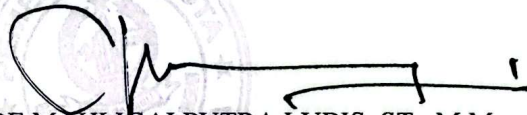
LAKIP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2024

- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksudkan agar dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, sebagai upaya berkesinambungan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, diharapkan sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga dapat menyusun strategi perencanaan kinerja yang lebih matang agar pencapaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih optimal.

Sibolga, Februari 2025

Plt. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SIBOLGA



ADE MAHLIGAI PUTRA LUBIS, ST., M.M.  
PEMBINA  
NIP. 19810505 200502 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Penjelasan umum Organisasi .....	2
1.3 Dasar Hukum .....	14
1.4 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja .....	16
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>17</b>
2.1 Rencana Strategis .....	17
2.2 Perjanjian Kinerja .....	28
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>29</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	29
3.2 Realisasi Anggaran .....	56
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin .....	10
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan .....	11
Tabel 1.3	Daftar Sarana Prasarana BPBD .....	11
Tabel 1.4	Tabel Permasalahan dan Solusi .....	13
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPBD Kota Sibolga Tahun 2021-2026.....	20
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2024 .....	24
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2024 BPBD Kota Sibolga .....	27
Tabel 3.1	Interval Nilai dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja .....	29
Tabel 3.2	Sasaran, Indikator Kinerja dan Kegiatan Tahun 2024.....	30
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	31
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 .....	35
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 .....	36
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 .....	37
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 .....	38
Tabel 3.8	Target Kinerja Jangka Menengah BPBD 2021-2026.....	38
Tabel 3.9	Monitoring IKD Inarisk Kab/Kota SE Sumatera Utara 2024	40
Tabel 3.10	Perbandingan IRB Kota Sibolga, Propinsi dan Nasional.....	41
Tabel 3.11	Analisa Capaian IKK 2021 .....	42
Tabel 3.12	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi .....	46
Tabel 3.13	Analisis Efisiensi Anggaran Yang Mendukung Indikator Kinerja .....	48
Tabel 3.14	Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	50
Tabel 3.15	Capaian Realisasi Anggaran 2024.....	56



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga .....	9
----------	---	---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di penanggulangan bencana. Dalam rangka upaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*), diperlukan penerapan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas kinerja yang diimplementasikan melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LAKIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah Kota Sibolga perlu melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Kinerja Pemerintah Kota Sibolga harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada setiap instansi pemerintah.

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Sibolga.

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah :

1. Memperoleh informasi mengenai kinerja BPBD Kota Sibolga selama Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja BPBD Kota Sibolga dan masukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah di masa yang akan datang.
3. Mendorong terciptanya tata laksana pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, dan terpercaya yang pelaksanaannya menitikberatkan pada keterpenuhan aspek efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan suatu program/kegiatan organisasi yang mana berkaitan pula dengan upaya penggunaan sumber daya masyarakat secara bijaksana.
4. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga.

## **1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga serta Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, dapat diuraikan sebagai berikut :

### **Kedudukan**

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana (KALAKSA) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

### **Tugas**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga mempunyai tugas :

- a) Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasi peta rawan bencana;
- d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan dan Penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

### **SUSUNAN ORGANISASI**

- 1) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan, yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

- 2) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
  1. Kepala;
  2. Unsur Pengarah; dan
  3. Unsur Pelaksana.
- 3) Unsur pengarah meliputi :
  - a. ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala BPBD; dan
  - b. anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari; 5 (lima) orang pejabat organisasi perangkat daerah yang bidang tugasnya terkait dengan penanggulangan bencana; dan 4 (empat) orang dari masyarakat profesional.
- 4) Susunan organisasi unsur pelaksana, terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
    2. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
    3. Subbagian Program
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi ;
    1. Seksi Pencegahan Bencana; dan
    2. Seksi Kesiapsiagaan Bencana.
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
    1. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
    2. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana.
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
    1. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana;
    2. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPBD dapat di tempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan daerah yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## TUGAS DAN FUNGSI

- (1) Kepala BPBD mempunyai tugas membantu Wali Kota sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup penanggulangan bencana, antara lain :
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasi peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
  - b. pengoordinasian komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
  - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi logistik dan peralatan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala BPBD, yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program, serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
    - a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja BPBD untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup BPBD;
  - c. memberikan bimbingan, melakukan pembagian tugas dan membuat penilaian kinerja berupa reward atau punishment serta memproses apabila terjadi pelanggaran disiplin pegawai BPBD;
  - d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
  - e. fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup BPBD sesuai dengan usulan bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumah tanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup BPBD agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
  - g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
  - h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup ke sekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
  - i. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada kepala BPBD; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala BPBD terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

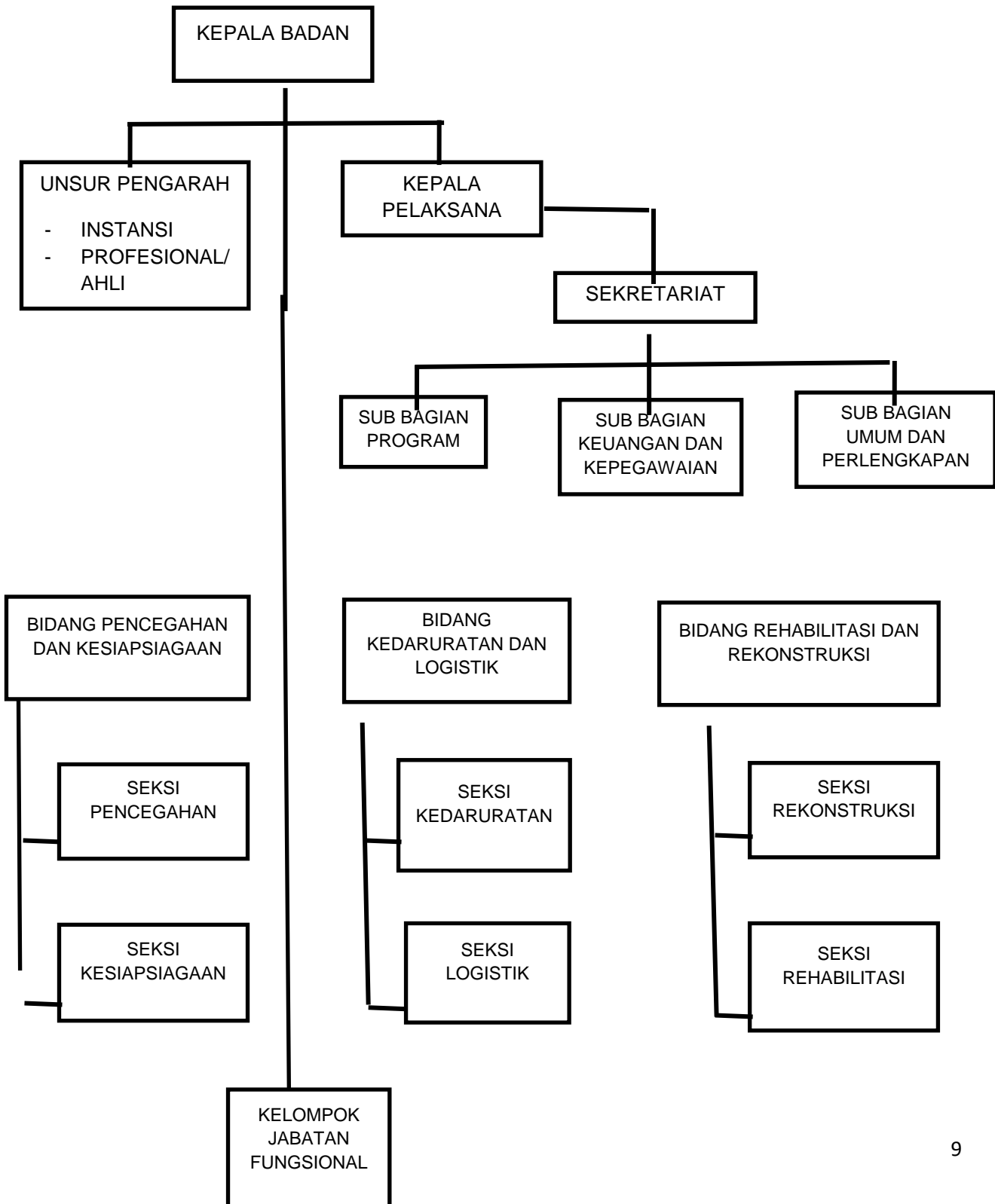
- a. menyusun rencana operasional program pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
  - b. membagi tugas, mengatur, membimbing dan melakukan pengawasan bawahan pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
  - c. memberi petunjuk kepada bawahan pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan pedoman teknis yang berlaku dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan pedoman teknis yang berlaku dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
  - e. mengatur pelaksanaan program pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan program penyuluhan dan pelatihan, pemetaan dan pendataan serta pengembangan sistem informasi bencana bidang pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
  - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
  - h. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kepada Kepala BPBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;



- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - c. pelaksanaan hubungan kerjasama, penguatan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - d. pemantauan, evaluasi, analisis pelaporan dan pemulihan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
  - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Selengkapnya struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar. 1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA SIBOLGA**



### SUMBERDAYA MANUSIA

Sedangkan kondisi dan Kebutuhan sumberdaya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga dapat dijabarkan sebagai berikut:  
Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga per Desember Tahun 2024 meliputi :

- a. PNS  
PNS = 21 orang
- b. Non PNS  
Tenaga Honor Lepas = 85 orang

**Tabel 1.1**

**Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	81
2	Perempuan	25
	<b>Jumlah</b>	106

Sumber Data : Kepegawaian BPBD Kota Sibolga per Desember 2024

Berdasarkan Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga berdasarkan jabatan yaitu :

- 1. Eselon II sebanyak 0 orang;
- 2. Eselon III sebanyak 4 orang;
- 3. Eselon IV sebanyak 9 orang;
- 4. Staf fungsional umum sebanyak 4 orang; dan
- 5. P3K sebanyak 4 orang

Untuk Pejabat Eselon II saat ini masih merupakan Pelaksana Tugas (Plt). Sedangkan 8 orang Eselon IV merupakan Sub Koordinator dari Pegawai yang merupakan Jabatan Fungsional hasil penyetaraan.

Sedangkan untuk komposisi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	2
2	S1	35
3	Diploma	3
4	SLTA	66
	<b>Jumlah</b>	<b>106</b>

Sumber Data : Kepegawaian BPBD Kota Sibolga per Desember 2024

Menurut Tabel 2.2 jumlah pegawai merupakan gabungan ASN/P3K dengan THL, sehingga berdasarkan jenjang pendidikan terdiri atas pegawai dengan pendidikan S2 sejumlah 2 orang atau 1,88%, pegawai dengan pendidikan S1 sejumlah 35 orang atau 33%, pegawai dengan jenjang Diploma sebanyak 3 orang atau 2,83%, pegawai dengan jenjang SLTA sebanyak 66 orang atau 62,26%.

Selain sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Kota Sibolga khususnya sarana prasarana dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi di Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Daftar Sarana Dan Prasarana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kota Sibolga**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Perahu Ployethylene	1 Unit	Baik
2	Kapal Cepat	1 Unit	Baik
3	Perahu karet + Mesin	1 unit	Baik
4	Ring Boy	2 Unit	Baik

LAKIP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2024

BAB I-Pendahuluan

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
5	Pendayung	5 Unit	Baik
6	Tenda Pengungsi	2 Unit	Baik
7	Tenda Keluarga	50 unit	Baik
8	Tandu Piber	2 Unit	Baik
9	Mobil Pick	1 Unit	Baik
10	Mobil Rescue	1 unit	Baik
11	Chainsaw	7 Unit	Baik
12	Pompa Punggung Pemadam Kebakaran Hutan	7 Unit	Baik
13	Gepyok Kawat / Pemukul Kawat Pemadam Api kebakaran Hutan	10 Unit	Baik
14	Sekop	20 Unit	Baik
15	Cangkul	15 Unit	Baik
16	Kampak	1 Unit	Baik
17	Linggis Besar	1 Unit	Baik
18	Palu Besar 5 Kg	1 Unit	Baik
19	Beko	2 Unit	Baik
20	Kasur Lipat	100 Lembar	Baik
21	Velbed	50 Unit	Baik
22	Matras	200 Lembar	Baik

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
23	Terpal	200 Lembar	Baik
24	Pompa Alkon	5 Unit	Baik

*Sumber Data : Pengurus Barang BPBD Kota Sibolga 2024*

Adapun Permasalahan Organisasi secara umum di lingkungan BPBD Kota Sibolga dapat dilihat pada **Tabel 1.4** berikut ini:

No	Permasalahan	Solusi
1	BPBD belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan sesuai SPM berdasarkan Permendagri no 59 Tahun 2021 dikarenakan anggaran BPBD masih belum memadai.	Mengusulkan kegiatan-kegiatan sesuai SPM Permendagri no 59 Tahun 2021 pada anggaran Tahun berikutnya.
2	Minimnya SDM yang telah mengikuti pelatihan teknis kebencanaan	Mengusulkan peningkatan pelatihan teknis kebencanaan bagi SDM di BPBD Kota Sibolga
3	Kurangnya fasilitas kantor dan sarana prasarana penanggulangan bencana serta peralatan keamanan petugas di lapangan sehingga menghambat kinerja dan tugas yang akan dilaksanakan baik dalam administrasi dan penanggulangan bencana.	Mengadakan Pengadaan fasilitas kantor kepada pegawai sehingga dapat lebih cepat dalam pengerjaan laporan bencana (administrasi) dan mengadakan sarana prasarana penanggulangan bencana

### 1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Berita Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

- 11 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sibolga Tahun 2005-2025;
- 12 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga;
- 13 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021-2026;
- 14 Peraturan Walikota Sibolga Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga.



#### 1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2024. Capaian kinerja Tahun 2024 dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 dapat diilustrasikan sebagai berikut:



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Sibolga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban untuk turut mensukseskan program pembangunan di daerah. Program Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Sibolga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan mengacu pada Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 29 Tahun 2020 Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga telah menyusun dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2021 - 2026, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021 - 2026 dan bersifat indikatif.

#### VISI DAN MISI

Adapun Visi Kota Sibolga tahun 2021-2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR”**

Sedangkan untuk mencapai visi tersebut maka Pemerintah Kota Sibolga juga harus memiliki misi yang tujuannya adalah merealisasikan maksud dan tujuan yang terkandung dalam visi tersebut. Untuk mewujudkan visi maka Pemerintah Kota Sibolga memiliki 5 misi yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang *Good Governance* dengan Transparan dan Akuntabel
2. Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk Menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota

pintar (*Smart City*).

4. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta Meningkatkan kesejahteraan guru.
5. Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah ;

**Misi Pertama :**

**“Mewujudkan tata kelola pemerintah yang Good Governance dengan transparan dan akuntabel”**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien.

**Misi Ketiga :**

**“Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk Menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (*Smart City*)”**

Tujuan dan Sasaran adalah tahap dimana dirumuskannya sasaran strategis yang dapat menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu untuk dilakukan agar mencapai visi dan misi dengan melalui isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dibuat berdasarkan turunan dari setiap masing-masing misi yang telah ditetapkan dan tetap memperhatikan visi utama. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang telah diukur sesuai dengan kaidah perumusan sasaran.

Berikut Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja BPBD Kota Sibolga Tahun 2021 – 2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.1

## Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja BPBD Kota Sibolga Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Target Kinerja				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	-	100	100	100	100	100
			Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	-	100	100	100	100	100
			Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat waktu	-	100	100	100	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat	-	81	81,5	82	82,5	83
2	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam pembangunan dan masyarakat		Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana = (ancaman x kerentanan) / kapasitas	167,20	151,30	147,70	137,80	137,80
		Menurunnya Risiko Bencana	Persentase penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dinyatakan sah/legal	(Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun/jumlah 1 dokumen KRB lengkap dan sudah di sahkan)X 100 %	0	0	100	0	0

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Target Kinerja				
					2021	2022	2023	2024	2025
			Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman	Jumlah masyarakat dikawasan rawan bencana yang menerima informasi/jumlah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana X 100%	100	100	100	100	100
			Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai dinyatakan sah/legal	(Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun/jumlah 1 dokumen RPB lengkap dan sudah di sahkan)X 100 %	0	0	0	100	0
			Persentase penyelesaian dokumen rencana kontijensi sampai dinyatakan sah/legal	(Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun/jumlah 1 dokumen Kontijensi lengkap dan sudah di sahkan)X 100 %	0	0	0	100	0
			Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	(Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan / jumlah aparatur dan warga negara keseluruhan) X 100 %	0	0	100	100	100
			Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan	(Jumlah warga negara yang ikut pelatihan/jumlah warga negara dalam wilayah rawan bencana) X 100%	0	0	100	100	100
			Persentase warga negara yang mendapat pelayanan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	(Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan pusdalops / jumlah warga negara yang berada di kawasan kawasan bencana) X	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Target Kinerja				
					2021	2022	2023	2024	2025
			(pusdalops ) dan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100 %					
			Persentase jumlah warga negara yang mendapat peralatan pelindung	(Jumlah warga negara yang mendapat peralatan pelindung/jumlah warga negara dalam cakupan bencana) X 100%	0	0	0	100	100
		Meningkatnya kecepatan penanganan darurat bencana	Persentase jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	(Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB/Jumlah seluruh penetapan status KLB) X 100%	100	100	100	100	100
			Persentase kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk setiap status darurat bencana	(Jumlah kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk setiap penetapan darurat bencana/Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana) X 100%	100	100	100	100	100
			Persentase jumlah petugas lapangan penanganan darurat bencana	(Jumlah petugas lapangan pelaksana penyelamatan dan evakuasi korban bencana/perkiraan jumlah keseluruhan pelaksana penyelamatan dan evakuasi korban bencana)X 100%	100	100	100	100	100
			Persentase jumlah korban yg berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban bencana	(Jumlah Korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi korban bencana/perkiraan jumlah	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Target Kinerja				
					2021	2022	2023	2024	2025
				keseluruhan dari korban bencana )X 100%					
		Terpulihkannya sarana dan prasarana terdampak bencana	Persentase pemenuhan kajian kebutuhan kerugian pasca bencana (JITUPASNA)	(jumlah kerusakan sarana prasarana akibat bencana yang dilakukan JITUPASNA/ jumlah kerusakan sarana prasarana akibat bencana yang seharusnya dilakukan JITUPASNA)X100%	0	0	100	100	100
			Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	(jumlah realisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan / jumlah keseluruhan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan )X100%	0	0	100	100	100
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Pengisian data dari 7 indikator dan 258 pertanyaan	0,28	0,28	0,28	0,29	0,31

Sumber : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026



## 2.2 RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga Tahun 2023 yang dalam hal ini diuraikan di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang diemban. Setiap organisasi perangkat daerah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut disajikan Indikator Kinerja Utama BPBD berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 yang bisa dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel. 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	-
		Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	-
		Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat waktu	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	-
2		Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana = (ancaman x kerentanan) / kapasitas
	Menurunnya Risiko Bencana	Persentase penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dinyatakan sah/legal	(Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun/jumlah 1 dokumen KRB lengkap dan sudah di sahkan)X 100 %

LAKIP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2024

BAB II-Perencanaan Kinerja

		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman	Jumlah masyarakat dikawasan rawan bencana yang menerima informasi/jumlah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana X 100%
		Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai dinyatakan sah/legal	(Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun/jumlah 1 dokumen RPB lengkap dan sudah di sahkan)X 100 %
		Persentase penyelesaian dokumen rencana kontijensi sampai dinyatakan sah/legal	(Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun/jumlah 1 dokumen Kontijensi lengkap dan sudah di sahkan)X 100 %
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	(Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan / jumlah aparatur dan warga negara keseluruhan) X 100 %
		Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan	(Jumlah warga negara yang ikut pelatihan/jumlah warga negara dalam wilayah rawan bencana) X 100%
		Persentase warga negara yang mendapat pelayanan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (pusdalops ) dan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	(Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan pusdalops / jumlah warga negara yang berada di kawasan kawasan bencana) X 100 %
		Persentase jumlah warga negara yang mendapat peralatan pelindung	(Jumlah warga negara yang mendapat peralatan pelindung/jumlah warga negara dalam cakupan bencana) X 100%
	Meningkatnya kecepatan penanganan darurat bencana	Persentase jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	(Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB/Jumlah seluruh penetapan status KLB) X 100%
		Persentase kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk setiap status darurat bencana	(Jumlah kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk setiap penetapan darurat bencana/Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana) X 100%
		Persentase jumlah petugas lapangan penanganan darurat bencana	(Jumlah petugas lapangan pelaksana penyelamatan dan evakuasi korban bencana/perkiraan jumlah

			keseluruhan pelaksana penyelamatan dan evakuasi korban bencana)X 100%
		Persentase jumlah korban yg berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban bencana	(Jumlah Korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi korban bencana/perkiraan jumlah keseluruhan dari korban bencana )X 100%
	Terpulihkannya sarana dan prasarana terdampak bencana	Persentase pemenuhan kajian kebutuhan kerugian pasca bencana (JITUPASNA)	(jumlah kerusakan sarana prasarana akibat bencana yang dilakukan JITUPASNA/ jumlah kerusakan sarana prasarana akibat bencana yang seharusnya dilakukan JITUPASNA)X100%
		Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	(jumlah realisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan / jumlah keseluruhan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan )X100%
	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Pengisian data dari 7 indikator dan 258 pertanyaan

**Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026**

Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dan target pencapaiannya dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan pedoman organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatannya dalam tahun bersangkutan.

Rencana Kinerja Tahunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2024 BPBD Kota Sibolga**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	100
			Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100
			Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat waktu	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5
2	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam pembangunan dan masyarakat		Indeks Risiko Bencana	137,80
		Menurunnya Risiko Bencana	Persentase penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dinyatakan sah/legal	0
			Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman	100
			Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai dinyatakan sah/legal	100
			Persentase penyelesaian dokumen rencana kontijensi sampai dinyatakan sah/legal	100
			Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100
			Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan	100
			Persentase warga negara yang mendapat pelayanan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (pusdalops ) dan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100
			Persentase jumlah warga negara yang mendapat peralatan pelindung	100

			Persentase jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	100
		Meningkatnya kecepatan penanganan darurat bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk setiap status darurat bencana	100
			Persentase jumlah petugas lapangan penanganan darurat bencana	100
			Persentase jumlah korban yg berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban bencana	100
			Terpulihkannya sarana dan prasarana terdampak bencana	100
			Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	100
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,29

**Sumber : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024**

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2024 dan melaporkannya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Perjanjian ini ditandatangani oleh penerima amanah, sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Perjanjian Kinerja dimaksud dapat dilihat pada Lampiran I LAKIP ini.

## **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Analisa Capaian Kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu kebijakan dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja Sasaran (*outcome*) dan Indikator Kinerja Kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Untuk kriteria penilaian dalam Realisasi Kinerja organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Interval Nilai dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja**

<b>No.</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

### 3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga dilakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian yang telah diperoleh dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Capaian Kinerja diukur berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga Tahun 2024. Adapun pencapaian Kinerja tahun 2024 diperoleh dari pelaksanaan 4 (Empat) sasaran dan 15 (Lima Belas) IKU dan 4 (Empat) Kegiatan dijabarkan kedalam tabel-tabel berikut:

**Tabel.3.2**  
**SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan
1	2	3	4
1	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks risiko bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Persentase penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dinyatakan sah/legal	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Tempat Tinggalnya	
		Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan
1	2	3	4
		Persentase warga negara yang mendapat pelayanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Persentase jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Persentase kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk setiap status darurat bencana	
		Persentase jumlah petugas lapangan penanganan darurat bencana	
		Persentase jumlah korban yg berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban bencana	
3	Terpuhikannya sarana dan prasarana terdampak bencana	Persentase pemenuhan kajian kebutuhan kerugian pasca bencana (JITUPASNA)	4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana	
		Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	
4	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Uraian terhadap pencapaian indikator kinerja program tersebut dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan kegiatan seperti tertera dalam tabel-tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks risiko bencana	137,80	165,92	0%
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Tempat Tinggalnya	100%	59,32%	59,32%
		Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai dinyatakan sah/legal	100%	0%	0%
		Persentase penyelesaian dokumen rencana kontijensi sampai dinyatakan sah/legal	100%	0%	0%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100%	0,17%	0,17%
		Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan	100%	0,17%	0,17%
		Persentase warga negara yang mendapat pelayanan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (pusdalops ) dan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%	100%	100%
		Persentase jumlah warga negara yang mendapat peralatan pelindung	100%	0%	0%
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Persentase jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	100%	0%	0%
		Persentase kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk setiap status darurat bencana	100%	0%	0%
		Persentase jumlah petugas lapangan penanganan darurat bencana	100%	80%	80%
		Persentase jumlah korban yg berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban bencana	100%	100%	100%
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana terdampak bencana	Persentase pemenuhan kajian kebutuhan kerugian pasca bencana (JITUPASNA)	100%	0%	0%
		Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	100%	0%	0%
4	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.28	0.33	100%

Dari tabel 3.3, di atas dapat dijelaskan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga sebagai berikut:

1. Pada sasaran Menurunnya Risiko Bencana Indikator Indeks Risiko Bencana dengan Target 137,80 dan Realisasi 165,920. Hal ini berarti Kota Sibolga sudah mampu menurunkan tingkat risiko bencana walau belum sesuai target.
2. Pada sasaran Menurunnya Risiko Bencana Indikator Kinerja Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Tempat Tinggalnya dengan Target 100% dan Realisasi 59,32% dengan rincian pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan simulasi kepada

masyarakat serta informasi melalui media sosial. Namun realisasi tersebut belum mencapai ke seluruh masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.

3. Pada sasaran Menurunnya Risiko Bencana Indikator Kinerja Persentase penyelesaian dokumen rencana penanggulangan bencana sampai dinyatakan sah/legal dengan Target 100% dan Realisasi 0%, hal ini dikarenakan tidak ada anggaran sehingga tidak terlaksana.
4. Pada sasaran Menurunnya Risiko Bencana Indikator Kinerja Persentase penyelesaian dokumen rencana kontijensi sampai dinyatakan sah/legal dengan Target 100% dan Realisasi 0%, hal ini dikarenakan tidak ada anggaran sehingga tidak terlaksana.
5. Pada sasaran Menurunnya Risiko Bencana Indikator Kinerja Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan dengan Target 100% dan Realisasi 0,17%, dengan rincian pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat.
6. Pada sasaran Menurunnya Risiko Bencana Indikator Kinerja Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan dengan Target 100% dan Realisasi 0,17%, dengan rincian pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat.
7. Pada sasaran Indikator Menurunnya Risiko Bencana Kinerja Persentase warga negara yang mendapat pelayanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dengan Target 100% dan Realisasi 100%, dengan rincian yaitu semua masyarakat yang terkena bencana tertangani dengan baik.
8. Pada sasaran Menurunnya Risiko Bencana Indikator Kinerja Persentase jumlah warga negara yang mendapat peralatan pelindung dengan Target 100% dan Realisasi 0%, hal ini dikarenakan tidak ada anggaran sehingga tidak terlaksana.
9. Pada sasaran Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana Indikator Kinerja Persentase jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB dengan Target 100% dan Realisasi 0%, hal ini dikarenakan di tahun 2024 tidak ada penetapan status KLB.
10. Pada sasaran Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana Indikator Kinerja Persentase kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk setiap status darurat bencana dengan Target 100% dan Realisasi 0%, hal ini dikarenakan di tahun 2024 tidak ada penetapan status darurat bencana.

11. Pada sasaran Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana Indikator Kinerja Persentase jumlah petugas lapangan penanganan darurat bencana dengan Target 100% dan Realisasi 80%, hal ini dikarenakan dari 106 petugas yang ada di BPBD, yang pasti turun ke lapangan yaitu sebanyak 85 orang petugas posko.
12. Pada sasaran Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana Indikator Kinerja Persentase jumlah korban yg berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban bencana dengan Target 100% dan Realisasi 100% , sehingga tercapai 100%.
13. Pada sasaran Terpulihkannya sarana dan prasarana terdampak bencana Indikator Kinerja Persentase pemenuhan kajian kebutuhan kerugian pasca bencana (JITUPASNA) dengan Target 100% dan Realisasi 0%, dikarenakan tidak ada kejadian yang ditetapkan menjadi darurat bencana dan dilakukan kajian JITUPASNA.
14. Pada Sasaran Terpulihkannya sarana dan prasarana terdampak bencana indikator Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan dengan Target 100% dan Realisasi 0% dikarenakan tidak ada dampak bencana yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
15. Pada Sasaran Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana indikator Peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan Target 0,28 dan Realisasi 0,33, hal ini menunjukkan adanya penguatan nilai kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Capaian indikator ini dapat terpenuhi melalui pengisian kuesioner dengan 71 indikator dan 284 pertanyaan tentang kesiapsiagaan Kota Sibolga dalam menghadapi bencana dan peran BPBD serta masyarakat mulai dari pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

### 3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Dari Tabel Analisis Capaian Sasaran Tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas selanjutnya akan dijelaskan dan dibandingkan dengan tahun 2023 sebagai berikut:

**Pencapaian Sasaran Strategis 1 :**  
**“Menurunnya Risiko Bencana”**

Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 serta dikaitkan dengan target Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**PERBANDINGAN PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 1**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Kenaikan/ Penurunan 2024	Target Kinerja 2024	Capaian 2024 terhadap Target (%)
			2023	2024			
1	Indeks risiko bencana	Indeks	167.20	165,92	(1,28)	147.70	0%
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Tempat Tinggalnya	%	70.36%	59,32%	(11,04%)	100%	59,32%
3	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai dinyatakan sah/legal	%	0%	100%	0%	100%	0%
4	Persentase penyelesaian dokumen rencana kontijensi sampai dinyatakan sah/legal	%	0%	100%	0%	100%	0%
5	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	62%	0,17%	(61,83%)	100%	0,17%
6	Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan	%	6%	0,17%	(5,83%)	100%	0,17%
7	Persentase warga negara yang mendapat pelayanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana dan prasarana	%	0%	100%	0%	100%	0%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Kenaikan/ Penurunan 2024	Target Kinerja 2024	Capaian 2024 terhadap Target (%)
			2023	2024			
	penanggulangan bencana						
8	Persentase jumlah warga negara yang mendapat peralatan pelindung	%	0%	0%	0%	100%	0%

Dari tabel diatas Perbandingan antara realisasi Tahun 2023 dan 2024 ada kenaikan dan penurunan realisasi di beberapa indikator kinerja.

**Pencapaian Sasaran Strategis 2 :**  
**“Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana”**

Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 serta dikaitkan dengan target Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**PERBANDINGAN PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 2**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Kenaikan/ Penurunan 2024	Target Kinerja 2024	Capaian 2024 terhadap Target (%)
			2023	2024			
1	Persentase jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	%	0%	0%	-	100%	0%
2	Persentase kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk setiap status darurat bencana	%	0%	0%	-	100%	0%
3	Persentase jumlah petugas lapangan penanganan darurat bencana	%	77%	80%	3%	100%	80%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Kenaikan/ Penurunan 2024	Target Kinerja 2024	Capaian 2024 terhadap Target (%)
			2023	2024			
4	Persentase jumlah korban yg berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban bencana	%	100%	100%	-	100%	100%

Dari tabel diatas Perbandingan antara realisasi Tahun 2023 dan 2024 ada kenaikan realisasi di 1 (satu) indikator kinerja.

**Pencapaian Sasaran Strategis 3 :**  
**“Terpulihkannya sarana dan prasarana terdampak bencana”**

Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 serta dikaitkan dengan target Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**PERBANDINGAN PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 3**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Kenaikan/ Penurunan 2024	Target Kinerja 2024	Capaian 2024 terhadap Target (%)
			2023	2024			
1	Persentase pemenuhan kajian kebutuhan kerugian pasca bencana (JITUPASNA)	%	100%	0%	100%	100%	0%
2	Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	%	100%	0%	100%	100%	0%

Dari tabel diatas Perbandingan antara realisasi Tahun 2023 dan 2024 ada penurunan realisasi dikedua indikator kinerja dikarenakan tidak adanya bencana yang ditetapkan status darurat bencana dan tidak ada sarana prasarana yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

**Pencapaian Sasaran Strategis 4 :**  
**“Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana”**

Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 serta dikaitkan dengan target Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**PERBANDINGAN PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 4**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Kenaikan/ Penurunan 2024	Target Kinerja 2024	Capaian 2024 terhadap Target (%)
			2023	2024			
1	Peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	indeks	0,23	0,33	0,10	0,28	0,33

Dari tabel diatas Perbandingan antara realisasi Tahun 2023 dan 2024 ada kenaikan realisasi indikator kinerja.

### 3.1.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)

Adapun Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel.3.8**  
**Target Kinerja Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	100	100	100
		Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100	100	100
		Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat waktu	100	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	81,32	98,56
2	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	137,80	165,92	83,05
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman	100	59,32	59,32
		Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai dinyatakan sah/legal	100	0	0

LAKIP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2024

BAB III

		Persentase penyelesaian dokumen rencana kontijensi sampai dinyatakan sah/legal	100	0	0
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100	0,17	0,17
		Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan	100	0,17	0,17
		Persentase warga negara yang mendapat pelayanan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (pusdalops ) dan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100	100	100
		Persentase jumlah warga negara yang mendapat peralatan pelindung	100	0	0
3	Meningkatnya kecepatan penanganan darurat bencana	Persentase jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	100	0	0
		Persentase kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk setiap status darurat bencana	100	0	0
		Persentase jumlah petugas lapangan penanganan darurat bencana	100	80	80
		Persentase jumlah korban yg berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban bencana	100	100	100
4	Terpulihkannya sarana dan prasarana terdampak bencana	Persentase pemenuhan kajian kebutuhan kerugian pasca bencana (JITUPASNA)	100	0	0
		Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	100	0	0
5	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.29	0.33	100



### 3.1.4. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar

#### Nasional

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyelenggarakan urusan Wajib penanggulangan bencana memiliki standar atau penilaian secara nasional yaitu Indeks Kapasitas Daerah (IKD). Dimana realisasi IKD Kota Sibolga tahun 2024 mengalami kenaikan/penguatan dengan nilai indeks kapasitas 0,33.

**Tabel.3.9**  
**MONITORING IKD INARISK KAB/KOTA SE SUMATERA UTARA**  
**TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Medan	0,70
2	Tebing Tinggi	0,44
3	Tapanuli Selatan	0,53
4	Deli Serdang	Tidak Menilai
5	Binjai	0,22
6	Karo	0,48
7	Pakpak Bharat	0,42
8	Serdang Bedagai	0,34
9	Gunung Sitoli	0,39
10	Tanjung Balai	0,37
11	Tapanuli Tengah	0,37
12	Humbang Hasundutan	0,33
13	Padang Lawas Utara	0,30
14	Nias Selatan	0,24
15	Tapanuli Utara	0,35
16	Mandailing Natal	0,29
17	Pematang Siantar	0,24
18	Labuhanbatu	0,28
19	Samosir	0,30
20	Toba	0,27
21	Labuhanbatu Utara	0,29
22	Langkat	0,27
23	Sibolga	0,33
24	Nias Barat	Tidak Menilai
25	Labuhanbatu Selatan	0,25
26	Asahan	0,35
27	Simalungun	0,22
28	Padang Lawas	Tidak Menilai
29	Padangsidempuan	0,38
30	Batubara	0,27
31	Nias	Tidak Menilai
32	Dairi	0,43
33	Nias Utara	Tidak Menilai

sejalan juga dengan tingkat Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Sibolga yang termasuk tinggi dan juga pencapaian Indikator Kinerja Kunci serta Standard Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga yang masih kecil.

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan IRB Kota Sibolga, Propinsi dan Nasional**

Tingkat/Tahun	Indeks Resiko Bencana
	2024
Nasional	122,11
Propinsi	139,84
Sibolga	165,92

*Sumber Data : INARISK Tahun 2024*

Indeks risiko bencana rata-rata nasional tahun 2024 yang menggunakan basis data bahaya dan kerentanan tahun 2024 adalah 122,11. Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks yang menggunakan basis data bahaya dan kerentanan tahun 2023, yaitu 132,25. sedangkan untuk nilai indeks risiko bencana kota sibolga telah mengalami perubahan dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu menjadi 165,92. Hal ini dipengaruhi oleh penilaian kerentanan dan tingkat kapasitas Kota Sibolga.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$R \approx H * \frac{V}{C}$$

Dimana :

- R = Tingkat Resiko Bencana
- H = Indeks Bahaya
- V = Indeks Kerentanan
- C = Indeks Kapasitas

Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

**Tabel 3.11**  
**Analisa Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Akhir Periode Tahun 2024**

1	<b>Mengukur jangkauan layanan informasi rawan bencana</b>								
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana								2.182 jiwa
	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>							
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi Rawan bencana	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	X 100	0	X	0 %	Tidak dilaksanakan
				Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan		0	10		
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	X 100	2.182	X	59,32%	Layanan informasi melalui, Website, FB, IG dan tatap muka
				Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		3.678	10		
2	<b>Mengukur jangkauan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>								
	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						3.678	X 100	100%
	Jumlah warga Kabupaten/Kota yang berada dilokasi rawan bencana						3.678		
	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>							
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	X100	0	X	0 %	Tidak dilaksanakan
				Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan		0	100		
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	X100	0	X	0 %	Tidak dilaksanakan

		dinyatakan sah/legal	Jumlah satu dokumen Rekon yang lengkap dan sudah disahkan	0	100			
	3	Persentase jumlah aparaturnya dan warga yang ikut pelatihan	Jumlah aparaturnya dan warga yang ikut pelatihan Jumlah aparaturnya dan warga kawasan rawan bencana X100	$\frac{160}{3.678}$	$\times 100$	3,67 %	Sosialisasi dan simulasi	
	4	Persentase warga yang ikut pelatihan	Jumlah warga yang ikut pelatihan Jumlah warga kawasan rawan bencana X100	$\frac{160}{3.678}$	$\times 100$	3,67 %	Sosialisasi dan simulasi	
	5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga yang mendapat layanan pusdalops Jumlah warga yang berada dikawasan rawan bencana X100	$\frac{70}{3.678}$	$\times 100$	1,9 %	Jumlah jiwa yang terdampak bencana	
	6	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan perlindungan masyarakat	Jumlah warga yang mendapat layanan peralatan perlindungan Jumlah warga yang berada dikawasan rawan bencana X100	$\frac{70}{3.678}$	$\times 100$	1,9 %	Jumlah jiwa yang terdampak bencana	
3	<b>Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>							
	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			X100	$\frac{70}{77}$	$\times 100$	100 %	
	Jumlah warga yang terkena korban bencana							
	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>						
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB X100	$\frac{0}{0}$	$\times 100$	0 %	Tidak ada KLB tahun 2023
			Jumlah seluruh penetapan status KLB					
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat X100	$\frac{0}{0}$	$\times 100$	0 %	Tidak ada

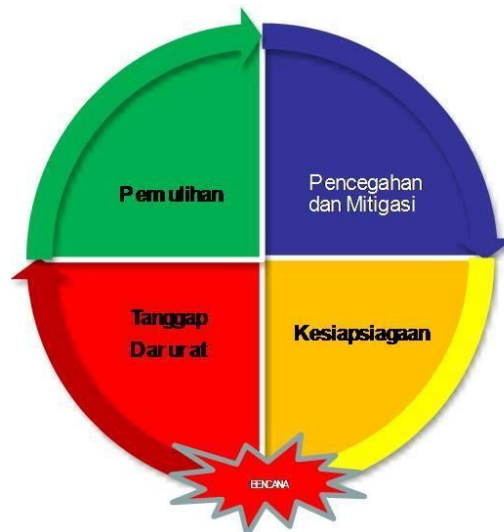
		untuk setiap status darurat bencana	bencana Jumlah seluruh penetapan darurat bencana	0		bencana yang ditetapkan status darurat
	3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana X100	$\frac{85}{106} \times 100$	80,18 %	Keseluruhan PNS dan THL BPBD
	4	Persentase jumlah korban hasil dicari, ditolong dan evakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan evakuasi Perkiraan Jumlah korban keseluruhan dari bencana X100	$\frac{70}{70} \times 100$	100 %	Jumlah jiwa terdampak bencana

### 3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab semua pihak, karena bencana dapat datang kapan saja, mengenai / berdampak kepada siapa saja dan tanpa pandang bulu, oleh karena itu kerjasama antara pemerintah dan pihak non pemerintah merupakan suatu hal penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Berikut penjabaran dari ketiga tahapan penanggulangan bencana :

Penanggulangan bencana di Kota Sibolga dimulai dari Program/kegiatan perencanaan sampai kepada tahap implementasi. Kegiatan ini tidak pernah berhenti karena kegiatan penanggulangan bencana merupakan sebuah siklus yang terus menyesuaikan dengan keadaan. Siklus penanggulangan bencana dapat terlihat pada gambar di bawah ini:

#### SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA



Gambar 3.1 Siklus Penanggulangan Bencana

Indikator Cakupan Penanggulangan bencana alam ini artinya keberhasilan kegiatan siaga penanggulangan bencana alam dalam penanggulangan bencana secara 24/7 jam yang dimana pelayanan siaga penanggulangan bencana dilaksanakan selama 24 jam dalam 7 hari kerja.

**Tabel 3.12**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	100	100	100	Dapat terlaksana dengan baik	-
		Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100	100	100	Dapat terlaksana dengan baik	-
		Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat waktu	100	100	100	Dapat terlaksana dengan baik	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	81,32	98,56	Masih kurang dalam pelaksanaan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat	Perlu peningkatan diberberapa indikator pelayanan
2	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	137,80	165,92	83,05	IRB mengalami penurunan dari sebelumnya 167,20 menjadi 165,92	Mengoptimalkan lagi kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan kapasitas daerah
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman	100	59,32	59,32	Pelayanan informasi kepada masyarakat belum menjangkau seluruh masyarakat yang berada di daerah rawan bencana	Perlu peningkatan sarana prasarana penyampaian informasi kepada masyarakat
		Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai dinyatakan sah/legal	100	0	0	Tidak terlaksana dikarenakan tidak ada anggaran	Perlu adanya anggaran dalam pembuatan dokumen RPB
		Persentase penyelesaian dokumen rencana kontijensi sampai dinyatakan sah/legal	100	0	0	Tidak terlaksana dikarenakan belum ada ASN yang mengikuti pelatihan	Agar tersedianya ASN yang telah mengikuti pelatihan
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100	0,17	0,17	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan adalah 160 orang	Perlu peningkatan dan partisipasi seluruh stakeholder untuk

LAKIP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2024

BAB III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8
							pelaksanaan pelatihan
		Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan	100	0,17	0,17	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan adalah 160 orang	Perlu peningkatan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan
		Persentase warga negara yang mendapat pelayanan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (pusdalops ) dan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100	100	100	Seluruh warga masyarakat yang terdampak bencana telah tertanggulangi dengan baik	-
		Persentase jumlah warga negara yang mendapat peralatan pelindung	100	0	0	Belum ada masyarakat yang memperoleh bantuan peralatan pelindung	Perlu anggaran dalam penyediaan bantuan peralatan pelindung
3	Meningkatnya kecepatan penanganan darurat bencana	Persentase jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	100	0	0	Tidak ada KLB di tahun 2024	-
		Persentase kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk setiap status darurat bencana	100	0	0	Tidak ada bencana yang ditetapkan sebagai status darurat bencana di tahun 2024	-
		Persentase jumlah petugas lapangan penanganan darurat bencana	100	80	80	Petugas lapangan telah hadir sesuai jumlah dalam grup disetiap penanggulangan bencana	-
		Persentase jumlah korban yg berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban bencana	100	100	100	Seluruh warga masyarakat yang terdampak bencana telah tertanggulangi dengan baik	-
4	Terpulihkannya sarana dan prasarana terdampak bencana	Persentase pemenuhan kajian kebutuhan kerugian pasca bencana (JITUPASNA)	100	0	0	Tidak terlaksananya pemenuhan JITUPASNA	Harus diopimalkan dalam hal pemenuhan JITUPASNA



LAKIP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2024

BAB III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	100	0	0	Tidak terlaksananya rencana rehabilitasi dan rekonstruksi maupun realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi	Perlu dioptimalkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
5	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.29	0.33	100	Terjadi pemenuhan target IKD yang awalnya ditargetkan 0,29 menjadi 0,33	Perlu peningkatan lagi

### 3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga pada Tahun 2024 di awal atau APBD murni BPBD memperoleh anggaran sebesar **Rp9.372.467.330** dan untuk program penanggulangan bencana anggarannya sebesar **Rp949.039.249**. Sedangkan di PABD 2023, BPBD mengalami penurunan anggaran menjadi **Rp7.525.519.418** dan untuk program penanggulangan bencana menjadi **Rp206.028.900**.

**Tabel 3.13**  
**Analisis Efisiensi Anggaran Yang Mendukung Indikator Kinerja**

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Efisiensi
		Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	100%	100%	100%	7.525.519.418	5.095.501.405	68%	Efisien
		Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100%	100%	100%				
		Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat waktu	100%	100%	100%				
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	81,32	98,56				
2	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	137,80	165,92	83,05	-	-	-	Efisien
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman	100%	59,32%	59,32%	-	-	-	Efisien

LAKIP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2024

BAB III

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Efisiensi
		Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai dinyatakan sah/legal	100	0	0	-	-	-	-
		Persentase penyelesaian dokumen rencana kontijensi sampai dinyatakan sah/legal	100	0	0	-	-	-	-
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100	0,17	0,17	-	-	-	Efisien
		Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan	100	0,17	0,17	-	-	-	Efisien
		Persentase warga negara yang mendapat pelayanan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (pusdalops ) dan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100	100	100	38.128.000	38.050.800	100	Efisien
						92.795.000	51.332.600	55	Efisien
3	Meningkatnya kecepatan penanganan darurat bencana	Persentase jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	100	0	0	-	-	-	-
		Persentase kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk setiap status darurat bencana	100	0	0	-	-	-	-
		Persentase jumlah petugas lapangan penanganan darurat bencana	100	80	80	-	-	-	-
		Persentase jumlah korban yg berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban bencana	100	100	100	75.105.000	75.105.000	100	Impas
4	Terpulihkannya sarana dan prasarana terdampak bencana	Persentase pemenuhan kajian kebutuhan kerugian pasca bencana (JITUPASNA)	100	0	0	-	-	-	-
		Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	100	0	0	-	-	-	-
5	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.29	0.33	100	-	-	-	Efisien

### 3.1.7. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Adapun Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel :

**Tabel.3.14**  
**Kegiatan yang menunjang keberhasilan Ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	2	3	4	5	6		7	8
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi".
		Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan waktu pengelolaan keuangan	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi".
		Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat waktu	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi".
		Indeks Kepuasan Masyarakat	98,56	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi".
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%/1 paket) sama dengan target (100%/ 1 paket). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi".

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	2	3	4	5	6		7	8
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%/30 orang) lebih besar dari target (100%/16 orang). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi”.
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi”.
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi”.
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi”.
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi”.
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi”.
				Penyediaan Barang dan Cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi”.
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi”.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	2	3	4	5	6		7	8
				Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi".
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi".
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi".
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi".
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi".
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi".
				Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi".
				Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi".

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	2	3	4	5	6		7	8
				Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
				Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori <b>"Sangat Tinggi"</b> .
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori <b>"Sangat Tinggi"</b> .
2	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	83,05	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Peningkatan pengurangan risiko bencana</b>	82%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (82%) tidak sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (82%). Indikator Kinerja masuk pada kategori <b>"Tinggi"</b> .
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman	59,32	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	12%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (12%) tidak sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (12%). Indikator Kinerja masuk pada kategori <b>"Sangat Rendah"</b> .
		Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai dinyatakan sah/legal	0	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	0%	Tidak Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (0%) tidak sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (0%). Indikator Kinerja masuk pada kategori <b>"Sangat Rendah"</b> .

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	2	3	4	5	6		7	8
		Persentase penyelesaian dokumen rencana kontinjensi sampai dinyatakan sah/legal	0	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	0%	Tidak Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (0%) tidak sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (0%). Indikator Kinerja masuk pada kategori <b>“Sangat Rendah”</b> .
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,17	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	69%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (12%) tidak sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (12%). Indikator Kinerja masuk pada kategori <b>“Sangat Rendah”</b> .
		Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan	0,17	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) tidak sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori <b>“Sangat Tinggi”</b> .
		Persentase warga negara yang mendapat pelayanan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (pusdalops ) dan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	71%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (71%) tidak sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (71%). Indikator Kinerja masuk pada kategori <b>“Sedang”</b> .
		Persentase jumlah warga negara yang mendapat peralatan pelindung	0					

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	2	3	4	5	6		7	8
3	Meningkatnya kecepatan penanganan darurat bencana	Persentase jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	0					
		Persentase kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk setiap status darurat bencana	0					
		Persentase jumlah petugas lapangan penanganan darurat bencana	80					
		Persentase jumlah korban yg berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban bencana	100					
4	Terpulihkannya sarana dan prasarana terdampak bencana	Persentase pemenuhan kajian kebutuhan kerugian pasca bencana (JITUPASNA)	0					
		Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	0					
5	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	100					



### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada sisi Belanja Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 (PAPBD) dari anggaran sebesar **Rp. 7.525.519.418** terealisasi sebesar **Rp. 5.095.501.405** atau sebesar **67,70%**, dengan Tabel Sebagai berikut ;

**Tabel.3.15**  
**Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.525.519.418	5.095.501.405	68
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.851.016.524	1.776.087.076	46
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.559.740.727	1.092.598.336	43
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	1.291.275.797	683.488.740	53
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	217.800.000	203.165.300	93
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	129.800.000	129.015.300	99
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	88.000.000	74.150.000	84
Administrasi Umum Perangkat Daerah	868.856.340	687.898.061	79
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	9.992.900	8.546.800	86
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.725.00	42.970.900	72
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.728.100	10.115.800	69
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	405.725.640	387.435.000	95
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	24.083.800	21.463.600	89
Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.778.800	17.454.600	68
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	328.822.000	199.911.361	61
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.130.477.260	2.067.170.018	97

LAKIP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2024

BAB III

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	3.336.000	74
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.777.260	68.009.018	73
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.033.200.000	1.995.825.000	98
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>251.340.394</b>	<b>196.692.550</b>	<b>78</b>
Penyediaan jasa Pemeilharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.361.550	80.435.300	83
Penyediaan jasa Pemeilharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.236.000	99.732.250	75
Pemeliharaan mebel	5.182.844	4.005.000	77
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.560.000	12.520.000	7
<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>206.028.900</b>	<b>164.488.400</b>	<b>80</b>
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiap siagaan Terhadap Bencana</b>	<b>130.923.900</b>	<b>89.383.400</b>	<b>68</b>
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	38.128.000	38.050.800	100
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	92.795.000	51.332.600	55
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>75.105.000</b>	<b>75.105.000</b>	<b>100</b>
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota	75.105.000	75.105.000	100

Dari tabel 3.16 diatas dapat dijelaskan bahwa ;

**1. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung yang merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan dipergunakan untuk mencukupi belanja pegawai dari anggaran sebesar **Rp. 3.851.016.524** terealisasi sebesar **Rp. 1.776.087.076** atau sebesar **46%**. Digunakan untuk membayar gaji pegawai dan tunjangan pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga dengan sisa anggaran **Rp. 2.074.929.448**.

## 2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung terkait dengan suatu program dan kegiatan. Realisasi belanja langsung sebesar **Rp. 3.319.414.329** atau sebesar **95%** dari total anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 3.674.502.894**. Sisa anggaran untuk belanja langsung sebesar **Rp 355.088.565**.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga Tahun 2024. Dalam LAKIP ini telah disajikan informasi kinerja yang telah dipertanggungjawabkan serta evaluasi dan analisis capaian yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Keberhasilan ini adalah berkat dukungan, keseriusan dan kerja sama yang baik dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga yang telah berupaya dan berbuat secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun karena keterbatasan faktor-faktor yang dimiliki, seperti keuangan, SDM dan fasilitas lain yang mendukung sehingga masih terdapat kendala yang memerlukan perhatian dan pembenahan pada tahun-tahun mendatang.

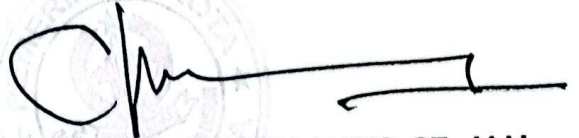
Akhirnya dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat dijadikan umpan balik guna peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang. LAKIP juga dapat dijadikan sebagai motivator untuk lebih meningkatkan kinerja terhadap tuntutan stakeholder, sehingga kontribusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga dalam penanggulangan bencana lebih dapat dirasakan. Oleh karena itu juga dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedepannya ada beberapa hal yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan kerawanan bencana di Kota Sibolga melalui pembuatan Kajian Risiko Bencana (KRB) beserta dokumen pendukung lainnya.
2. Pembuatan dokumen-dokumen penunjang penanggulangan kebencanaan.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor, perlindungan dan penanggulangan bencana;
4. Meningkatkan kualitas aparatur/personil untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga dalam hal penanggulangan bencana mulai dari Pra Bencana, Tanggap Darurat hingga Pasca Bencana,

5. Menindaklanjuti penilaian BNPB (pusat) terhadap nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Sibolga agar dapat ditingkatkan lagi untuk dapat menurunkan nilai Indeks Risiko Bencana (IRB).

Sibolga, Februari 2025  
Pit. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SIBOLGA  
SEKRETARIS,



ADE MAHLIGAI PUTRA LUBIS, ST., M.M.  
PEMBINA  
NIP. 19810505 200502 1 003